



Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten

Nurbaeti^{1*}, dan Anggita Nurcahyani²

¹Universitas Mercubuana, Indonesia

²UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

E-mail: 55120120112@student.mercubuana.ac.id

ABSTRACT

Efficiency and effectiveness of financial management is needed to finance implementation of government tasks. The formulation of the problem in this study are: 1) How is the performance government-based financial management efficiency level of regional finance in Banten? 2) How is the government's financial performance based on the level of financial effectiveness in Banten. This study aims: 1) To analyze the government's financial performance based on the efficiency level of regional financial management in Banten, 2) To analyze the government's financial performance based on the level of financial effectiveness in Banten during. This type of research is descriptive quantitative research. Using regional financial ratio analysis methods and non-parametric methods Data Analysis Envelopment (DEA) assuming Variable Return to Scale (VRS) output-oriented. Based on the analysis of the efficiency level of regional financial performance in districts and cities in Banten Province using ratio analysis, Efficiency financial management of districts and cities in Banten, there are two local governments that can be categorized as quite efficient, namely: Lebak Regency and Pandeglang Regency. Based on the analysis of the level of effectiveness there are 7 districts and cities that are very effective and only Cilegon is included in the effective category. Financial management efficiency level regions using the DEA method with an intermediation approach, assuming VRS and output-oriented individually showing the results that there is no area that gets a score maximum efficiency reaches 100%.

Keywords: *Efficiency, Effectiveness, DEA, Financial Performance*

Pendahuluan

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah yang otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang.

Otonomi daerah bukan hanya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat (Yani, 2002).

Ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan daerah otonomi, yaitu: (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar (Halim dalam (Saputra, 2014).

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang 1 (satu) atau dibawah 100 (seratus) persen. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik dan pengelolaan keuangan daerah semakin efisien.

Rasio efektivitas keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Pengukuran rasio efektivitas penting dilakukan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah merealisasikan PAD yang termasuk komponen penting pada Daerah Otonom, dikatakan efektif bila mencapai 1 (satu) atau 100 (seratus) persen. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kinerja keuangan pemerintah semakin baik.

Selain rasio efektivitas hal yang penting dalam melaksanakan melaksanakan dan mewujudkan otonomi daerah adalah menekan biaya pengeluaran daerah. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya.

Kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan 15 rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Mardiasmo, 2004).

APBD merupakan instrument kebijakan utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrument kebijakan, APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD mempunyai fungsi otoritas yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah (Mardiasmo, 2004).

Keberhasilan menggali dan meningkatkan pendapatan daerah harus diimbangi dengan keberhasilan daerah dalam menekan pengeluaran daerah. Pengeluaran daerah atau belanja

daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah (Mahsun, 2012).

Salah satu semangat reformasi keuangan daerah adalah dilakukannya pertanggungjawaban keuangan oleh Pemerintah Daerah dan penilaian kinerja keuangan daerah otonomi agar dapat diketahui sejauh mana pemerintah daerah otonom mampu melaksanakan otonomi khususnya dibidang keuangan.

Pertanggungjawaban keuangan kepala daerah kabupaten atau kota di Provinsi Banten telah dilakukan sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 dihadapan DPRD Kabupaten dan Kota. Namun, pertanggungjawaban tersebut belum dilengkapi dengan informasi tentang bagaimanakah kinerja keuangan dan berbagai dimensi keuangan daerah otonom agar dapat diperoleh penilaian kinerja keuangan yang lebih komprehensif dalam melaksanakan otonomi keuangan daerah. Dalam kaitan ini sangatlah relevan dilakukan penelitian untuk mengetahui kinerja keuangan daerah otonom Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.

Pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya dapat menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah di tetapkan dan dilaksanakan. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Melalui analisis tersebut pemerintah dapat menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah (Halim, 2008).

Berdasarkan pemaparan latar belakang penulis melakukan penelitian kinerja keuangan daerah berdasarkan tingkat efektivitas dan efisiensi keuangan daerah yang berjudul: Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten.

Tinjauan Pustaka

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (Yani, 2002).

Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang merata.

Pengaturan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 merupakan aturan yang bersifat umum dan lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan secara rinci ditetapkan oleh masing-masing daerah. Kebhinekaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut masih sejalan atau tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah. APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah

berupa perhitungan APBD (Saputra, 2014).

Pengukuran kinerja yang digunakan secara umum oleh perusahaan yang berorientasi pada pencapaian laba antara lain melalui penetapan rasio keuangan. Rasio yang dimaksud dalam laporan keuangan adalah suatu angka yang menunjukkan hubungan antara suatu unsur dengan unsur lainnya.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah, yaitu rasio kemandirian keuangan (otonomi fiskal), rasio efektivitas terhadap pendapatan asli daerah, rasio efisiensi daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan (analisis shift), rasio proporsi pendapatan dan belanja (analisis share).

Selanjutnya kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan menganalisis skala efisiensi. Efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan dapat mencapai tujuan organisasi tertentu. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (Ulum, 2012).

Analisis efektivitas juga perlu dilakukan pada penggunaan keuangan daerah. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 efektivitas merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditentukan, yaitu dengan cara membandingkan pengeluaran dengan hasil.

Rasio efektivitas keuangan daerah (selanjutnya disebut “rasio EKD”) menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Dalam pandangan ekonomi Islam, kinerja (hasil kerja) terkait dengan segala sesuatu yang telah dilakukan oleh seorang individu relevan dengan standar tertentu. Terkait dengan kinerja manusia, Allah mengungkapkannya dalam bentuk pahala dan siksa. Ketika manusia melaksanakan segala perintah Allah maka Allah memberinya pahala. Sebaliknya ketika manusia melanggar aturan yang telah digariskan-Nya, maka Allah akan mengazabnya dengan siksa yang pedih, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran diantaranya Surat Al-Kahfi ayat 87-88. Sehingga penilaian kinerja dalam Islam harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Al-Quran.

Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjaannya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.

Dalam melaksanakan pemungutan pendapatan Negara, ada beberapa prinsip yang harus ditaati oleh Ulil Amri, yaitu: 1) Harus ada Nash (Al-Quran dan Hadis) yang memerintahnya, 2) Harus ada yang dibedakan muslim dan non-muslim, 3) Hanya golongan kaya yang

menanggung beban, dan 4) Adanya tuntutan kemaslahatan umum.

Metode

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Banten periode 2015 sampai dengan 2018. Laporan realisasi APBD diperoleh dari BPKAD di Provinsi Banten.

Teknis analisis data yang digunakan yaitu dengan menghitung rasio efisiensi dan efektivitas. Kemudian menjadikan kedua rasio tersebut sebagai variabel output dan variabel inputnya adalah Realisasi PAD, Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan untuk kemudian mengukur tingkat efisiensi menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Pengukuran efisiensi ini berorientasi pada output (output oriented) dengan asumsi Variable Return to Scale (VRS) menggunakan bantuan *software* MaxDEA 8 Basic.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Analisis Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Menggunakan Analisis Rasio

Efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat dihitung dengan perbandingan antara realisasi belanja daerah terhadap realisasi penerimaan daerah. Besarnya rasio efisiensi keuangan daerah pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten selama periode 2015-2018 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1.
Rasio Efisiensi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten 2015-2018

No	Nama Kabupaten/Kota	Rasio Efisiensi(%)				Kategori	
		2015	2016	2017	2018	Rata-Rata	Keterangan
1	Kota Tangerang Selatan	100,71	108,42	98,9	101,82	102,4625	TIDAK EFISIEN
2	Kota Tangerang	91,73	109,07	99,11	107,93	101,96	TIDAK EFISIEN
3	Kabupaten Tangerang	94,85	88,84	86,37	97,17	91,8075	KURANG EFISIEN
4	Kabupaten Serang	101,62	103,06	83,41	102,72	97,7025	KURANG EFISIEN
5	Kota Serang	96,04	99,76	108,05	98,83	100,67	TIDAK EFISIEN
6	Kota Cilegon	103,82	99,63	102,83	97,49	100,9425	TIDAK EFISIEN
7	Kabupaten Pandeglang	88,62	84,82	86,61	88,57	87,155	CUKUP EFISIEN
8	Kabupaten Lebak	93,52	83,95	85,65	83,16	86,57	CUKUP EFISIEN

Sumber: Olah data menggunakan Ms.Excel 2010

Hasil perhitungan pada tabel di atas merupakan hasil perbandingan Realisasi Belanja dan Realisasi Pendapatan Daerah dari seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, maka rasio efisiensi Pendapatan Daerah dapat diketahui. Secara rata-rata efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, berada pada rasio 96,36 % untuk tahun 2015, 97,2 % untuk tahun 2016, 93,87 % untuk tahun 2017, dan semakin meningkat di tahun 2018 menjadi 97,21. Secara rata-rata, kecenderungan efisien pengelolaan keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten dari tahun 2015-2018 sebesar 96,16 % yang berada pada kategori kurang efisien.

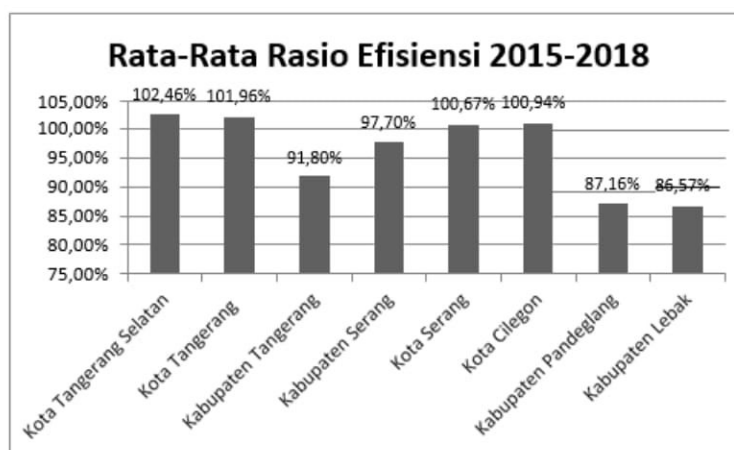
Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Rasio efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan tingkat efisiensi

paling rendah atau berada pada angka di bawah 100% untuk tahun 2015, 2016, 2017 sampai 2018 secara berturut-turut 88,62, 84,82, 86,61, dan 88,57 diperoleh Kabupaten Pandeglang berada pada kategori cukup efisien. Sedangkan rasio efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah dengan tingkat efisiensi tertinggi berada dalam angka lebih dari 100% untuk tahun 2015 diperoleh Kota Cilegon sebesar 103,82%, tahun 2016 diperoleh Kota Tangerang Selatan sebesar 108,42%, tahun 2017 diperoleh Kota Serang sebesar 108,05%, selanjutnya tahun 2018 diperoleh Kota Tangerang sebesar 107,93%. Semuanya dalam kategori tidak efisien.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten adalah berfluktuasi. Secara rata-rata dari tahun 2015 sampai dengan 2018, efisiensi keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten adalah 96,16% yang berada pada kategori kurang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah kurang baik.

Dari tabel 1 diatas dapat dibuat grafik rata-rata efisiensi keuangan daerah sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.
Rata-rata Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Periode 2015-2018



Sumber: Olah data menggunakan Ms.Excel 2010

Gambar di atas menunjukkan bahwa rata-rata rasio efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten selama 2015- 2018 dengan kategori tingkat efisien terendah atau berada pada angka di bawah 100% adalah Kabupaten Lebak sebesar 86,57% menunjukkan bahwa Kabupaten Lebak cukup efisien, sedangkan rasio efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten dengan kategori tingkat efisiensi tertinggi atau berada pada angka di atas 100% adalah Kota Tangerang Selatan sebesar 102,46% menunjukkan bahwa Kota Tangerang Selatan tidak efisien.

Analisis Efektivitas Keuangan Daerah menggunakan Analisis Rasio

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pendapatan asli daerah dengan anggaran penerimaan pendapatan asli daerah. Besarnya rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten pada tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten 2015-2018

No	Nama Kabupaten/Kota	Rasio Efektivitas(%)	Tahun				Kategori	
			2015	2016	2017	2018	Rata-Rata	Keterangan
1	Kota Tangerang Selatan	109,67	108,24	111,99	108,55	109,6125		SANGAT EFEKTIF
2	Kota Tangerang	114,07	110,34	120,05	109	113,365		SANGAT EFEKTIF
3	Kabupaten Tangerang	116,73	117,07	127,76	115,15	119,1775		SANGAT EFEKTIF
4	Kabupaten Serang	104,39	104,66	105,44	103,19	104,42		SANGAT EFEKTIF
5	Kota Serang	118,72	110,22	108,21	108,33	111,37		SANGAT EFEKTIF
6	Kota Cilegon	112,36	100,68	85,35	78,85	94,31		EFEKTIF
7	Kabupaten Pandeglang	107,32	102,65	110,2	95,79	103,99		SANGAT EFEKTIF
8	Kabupaten Lebak	114,3	95,1	102,75	113,09	106,31		SANGAT EFEKTIF

Sumber: Olah data menggunakan Ms.Excel 2010

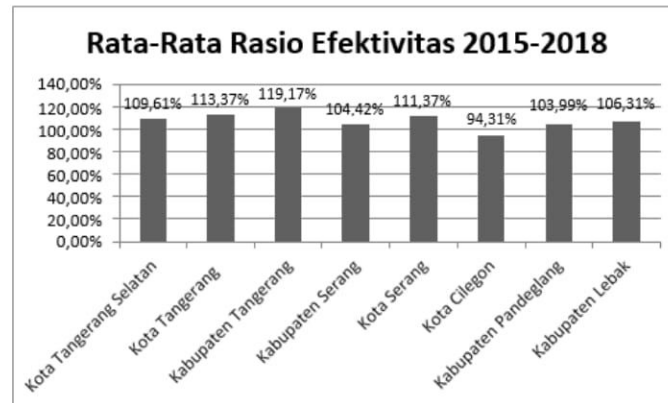
Hasil perhitungan pada tabel tersebut merupakan hasil perbandingan realisasi PAD dan Taarget PAD dari seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, maka rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah dapat diketahui. Secara rata-rata efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, berada pada rasio 112,2% untuk tahun 2015, 106,12% untuk tahun 2016, 108,97% untuk tahun 2017, dan semakin menurun di tahun 2018 menjadi 103,99%. Secara rata-rata, kecenderungan efektivitas PAD Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten dari tahun 2015-2018 sebesar 107,82% yang berada pada kategori sangat efektif.

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah tertinggi diperoleh Kota Serang untuk tahun 2015, tahun 2016, 2017 sampai 2018 diperoleh Kabupaten Tangerang sebesar 117,07%, 127,76%, dan 115,15%, dengan kecenderungan rata-ratanya dari tahun 2015 sampai 2018 adalah 107,82% sehingga berada pada kategori sangat efektif. Sedangkan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah terendah, untuk tahun 2015 diperoleh Kabupaten Serang yaitu 104,39%, dengan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah rata-rata 112,2%. Di tahun 2016 diperoleh Kabupaten Lebak yaitu 95,1 dengan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah rata-rata 106,12%. Di tahun 2017 dan 2018 diperoleh Kota Cilegon sebesar 85,35% dan 94,31 dengan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah rata-rata 102,75% dan 103,99.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten adalah berfluktuasi. Secara rata-rata dari tahun 2015 sampai dengan 2018, efektivitas keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten adalah 107,82% yang berada pada kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerahpun semakin baik.

Dari tabel diatas dapat dibuat grafik rata-rata efektivitas keuangan daerah sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.
Rata-Rata Rasio Efektivitas Keuangan Daerah
Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten
Periode 2015-2018



Sumber: Olah data menggunakan Ms.Excel 2010

Gambar tersebut menunjukkan bahwa rata-rata rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten selama 2015- 2018 dengan kategori tingkat efektivitas tertinggi adalah Kabupaten Tangerang sebesar 119,17% menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang sangat efektif, sedangkan rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten dengan kategori tingkat efektivitas terendah adalah Kota Cilegon sebesar 94,31% menunjukkan bahwa Kota Cilegon efektif.

Hasil Analisis Metode Non Parametrik *Data Envelopment Analysis* (DEA) **Kota Tangerang Selatan**

Hasil pengukuran tingkat efisiensi Kota Tangerang Selatan dengan pendekatan intermediasi menggunakan analisis VRS (*Variable Return To Scale*), pengukuran berdasarkan *output oriented* adalah sebagai berikut:

Tabel 3.
Tingkat Efisiensi Kota Tangerang Selatan (%)

Tahun	2015	2016	2017	2018
Score Efisien	97,07	100	97,04	96,67

Sumber: Olah data MaxDEA asumsi VRS

Berdasarkan tabel tersebut efisiensi terendah yang dicapai oleh Kota Tangerang Selatan pada tahun 2018 yakni sebesar 96,67%.

Kota Tangerang

Hasil pengukuran tingkat efisiensi Kota Tangerang dengan pendekatan intermediasi menggunakan analisis VRS (*Variable Return To Scale*), pengukuran berdasarkan *output oriented* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.
Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang (%)

Tahun	2015	2016	2017	2018
Score Efisiensi	94,97	100	100	98,95

Sumber: Olah Data MaxDEA asumsi VRS

Dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Tangerang menunjukkan angkaterendah sebesar 94,97 di tahun 2015. pada tahun 2016 dan 2017, Kota Tangerang memperoleh nilai efisiensi sempurna kembali. Namun pada tahun 2018, Kota Tangerang mengalami penurunan angka presentasi sebesar 98,95%.

Kabupaten Tangerang

Hasil pengukuran tingkat efisiensi Kota Tangerang Selatan dengan pendekatan intermediasi menggunakan analisis VRS (*Variable Return To Scale*), pengukuran berdasarkan *output oriented* adalah sebagai berikut:

Tabel 5.
Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah KabupatenTangerang (%)

Tahun	2015	2016	2017	2018
Score Efisien	96,90	95,13	100	96,87

Sumber: Olah Data MxDEA asumsi VRS

Kabupaten Tangerang mengalami penurunan efisiensi pada tahun 2016 sebesar 95,13. Nilai tersebut merupakan presentase efisiensi terendah yang dialami oleh Kabupaten Tangerang selama tahun 2015 sampai dengan 2018.

Kabupaten Serang

Hasil pengukuran tingkat efisiensi Kabupaten Serang dengan pendekatan intermediasi menggunakan analisis VRS (*Variable Return to Scale*), pengukuran berdasarkan *output-oriented* adalah sebagai berikut:

Tabel 6.
Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah KabupatenSerang (%)

Tahun	2015	2016	2017	2018
Score Efisiensi	94,97	95,71	87,67	94,76

Sumber: olah data MaxDEA asumsi VRS

Dari tabel di atas, tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Serang mengalami penurunan. Efisiensi terendah yang dicapai oleh Kabupaten Serang pada tahun 2017 yakni sebesar 87,67%.

Kota Serang

Hasil pengukuran tingkat efisiensi Kota Serang dengan pendekatan intermediasi menggunakan analisis VRS (*Variable Return to Scale*), pengukuran berdasarkan *output oriented* adalah sebagai berikut:

Tabel 7.
Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (%)

Tahun	2015	2016	2017	2018
Score Efisiensi	100	100	100	98,63

Sumber: olah data MaxDEA asumsi VRS

Pengelolaan keuangan daerah Kota Serang mengalami penurunan efisiensi pada tahun 2018 sebesar 98,63%. Nilai tersebut merupakan presentase efisiensi terendah yang dialami Kota Serang selama tahun 2015 sampai dengan 2018.

Kota Cilegon

Hasil pengukuran tingkat efisiensi Kota Cilegon dengan pendekatan intermediasi menggunakan analisis VRS (*Variable Return To Scale*), pengukuran berdasarkan *output oriented* adalah sebagai berikut:

Tabel 8.
Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon(%)

Tahun	2015	2016	2017	2018
Score Efisiensi	100	92,43	95.3	90,46

Sumber: olah data MaxDEA asumsi VRS

Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Cilegon mengalami penurunan. Efisiensi terendah yang dicapai Kota Cilegon pada tahun 2018 yakni sebesar 90,46%.

Kabupaten Pandeglang

Hasil pengukuran tingkat efisiensi Kabupaten Pandeglang dengan pendekatan intermediasi menggunakan analisis VRS (*Variable Return To Scale*), pengukuran berdasarkan *output oriented* adalah sebagai berikut:

Tabel 9.
Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang (%)

Tahun	2015	2016	2017	2018
Score Efisiensi	91,13	87,16	92,1	85,46

Sumber: Olah Data MaxDEA Asumsi VRS

Dari tabel di atas, tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pandeglang mengalami penurunan. Efisiensi terendah yang dicapai oleh Kabupaten Pandeglang pada tahun 2018 yakni sebesar 85,46%.

Kabupaten Lebak

Hasil pengukuran tingkat efisiensi Kabupaten Lebak dengan pendekatan intermediasi menggunakan analisis VRS (*Variable Return To Scale*), pengukuran berdasarkan *output oriented* adalah sebagai berikut:

Tabel 10.
Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lebak (%)

Tahun	2015	2016	2017	2018
Score Efisiensi	96,54	83	87,32	94,62

Sumber: Olah Data MaxDEA Asumsi VRS

Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lebak mengalami penurunan. Efisiensi terendah yang dicapai oleh Kabupaten Pandeglang pada tahun 2016 yakni sebesar 83%.

Tabel di bawah ini menunjukkan rata-rata efisiensi keuangan daerah tahun 2015-2018:

Tabel 11.
Efisiensi Rata-rata Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2015-2018

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				MEAN
		2015	2016	2017	2018	
1	Kota Tangerang Selatan	97,07	100	97,04	96,67	97,695
2	Kota Tangerang	94,97	100	100	98,95	98,48
3	Kabupaten Tangerang	96,9	95,13	100	98,87	97,725
4	Kabupaten Serang	94,97	95,71	87,67	94,76	93,2775
5	Kota Serang	100	100	100	98,63	99,6575
6	Kota Cilegon	100	92,43	95,3	90,46	94,5475

7	Kabupaten Pandeglang	91,13	87,16	92,1	85,46	88,9625
8	Kabupaten Lebak	96,54	83	87,32	94,62	90,37
MEAN		96,4475	94,17875	94,92875	94,8025	

Dapat dilihat bahwa efisiensi rata-rata pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten per tahunnya memiliki nilai efisiensi kurang sempurna, tidak ada satu pun pemerintah daerah yang mencapai nilai efisiensi sempurna. Pemerintah daerah yang memiliki nilai efisiensi rata-rata tertinggi adalah Kota Serang dengan score 99,66%. Sementara pemerintah daerah yang memiliki nilai efisiensi rata-rata terendah adalah Kabupaten Pandeglang dengan score 88,96%.

Rata-rata efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten secara keseluruhan dengan studi kasus pada Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Banten dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi kinerja efisiensi selama periode pengamatan. Score rata-rata tertinggi efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten terjadi pada tahun 2015. Pada tahun 2015 nilai efisiensi rata-rata pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten sebesar 96,45%.

Pada tahun selanjutnya, efisiensi rata-rata menurun sebesar 2,27% menjadi 94,18. Pada tahun 2017 efisiensi rata-rata mengalami peningkatan sebesar 0,75% menjadi 94,93%. Dan pada akhir tahun penelitian yakni 2018, efisiensi rata-rata pengelolaan keuangan daerah kembali mengalami penurunan sebesar 0,13%.

Pembahasan

Analisis Tingkat Efisiensi Delapan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten Menggunakan Analisis Rasio Selama Periode 2015- 2018

Belanja daerah haruslah dapat diimbangi dengan penerimaan daerahnya. Hal ini disebabkan, jika belanja daerah yang tidak dapat diimbangi oleh penerimaan daerah maka akan terjadi defisit anggaran daerah. Sebaliknya apabila penerimaan daerah lebih besar dari belanja daerah, maka akan terjadi surplus anggaran daerah. Surplus anggaran daerah ini disebabkan karena adanya efisiensi yang dijalankan oleh pemerintah daerah dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk mengetahui tingkat efisiensi keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten yaitu dengan membandingkan antara realisasi belanja daerah terhadap realisasi penerimaan daerah. Semakin besar rasio efisiensi, maka akan semakin tidak efisien pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2015 sampai 2018 berada pada tingkat pengelolaan keuangan daerah yang tidak efisien dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 102,46 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah berdasarkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah kurang baik. Rasio efisiensi yang melebihi 100 persen mempunyai arti bahwa belanja daerah telah melebihi anggaran yang tersedia, sehingga belanja daerah tersebut dibiayai dengan sumber dana lain seperti dana SILPA, pinjaman kepada pusat atau pinjaman kepada lembaga keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Tangerang tahun anggaran 2015 sampai 2018 berada pada tingkat tidak pengelolaan keuangan daerah yang efisien dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 101,96 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah berdasarkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah kurang baik. Rasio efisiensi yang melebihi 100 persen mempunyai arti bahwa belanja daerah telah melebihi anggaran yang tersedia, sehingga belanja daerah tersebut dibiayai dengan sumber dana lain.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tangerang tahun anggaran 2015 sampai 2018 berada pada tingkat pengelolaan keuangan daerah yang kurang efisien dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 91,81 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah berdasarkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah cukup baik. Rasio efisiensi yang tidak melebihi 100 persen mempunyai arti bahwa belanja daerah tidak melebihi anggaran yang tersedia.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Serang tahun anggaran 2015 sampai 2018 berada pada tingkat pengelolaan keuangan daerah yang kurang efisien dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 97,7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah berdasarkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah kurang baik.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Serang tahun anggaran 2015 sampai 2018 berada pada tingkat pengelolaan keuangan daerah yang tidak efisien dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 100,67 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah berdasarkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah kurang baik. Rasio efisiensi yang melebihi 100 persen mempunyai arti bahwa belanja daerah telah melebihi anggaran yang tersedia, sehingga belanja daerah tersebut dibiayai dengan sumber dana lain.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Cilegon tahun anggaran 2015 sampai 2018 berada pada tingkat pengelolaan keuangan daerah yang tidak efisien dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 100,94 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah berdasarkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah kurang baik. Rasio efisiensi yang melebihi 100 persen mempunyai arti bahwa belanja daerah telah melebihi anggaran yang tersedia, sehingga belanja daerah tersebut dibiayai dengan sumber dana lain.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pandeglang tahun anggaran 2015 sampai 2018 berada pada tingkat pengelolaan keuangan daerah yang cukup efisien dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 87,16 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah berdasarkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah cukup baik.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lebak tahun anggaran 2015 sampai 2018 berada pada tingkat pengelolaan keuangan daerah yang cukup efisien dengan rata-rata rasio efisiensi sebesar 86,57 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah berdasarkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah cukup baik.

Dari hasil perhitungan pada seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, daerah yang mengalami penilaian cukup efisien yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang dengan kriteria cukup efisien, namun penilaian efisiensi terbaik diraih oleh Kabupaten Lebak dengan nilai efisiensi terendah yaitu 83,16 persen. Sedangkan daerah yang mengalami penilaian tidak efisien dengan angka tertinggi adalah Kota Tangerang Selatan yaitu 102,46 persen, karena semakin besar rasio efisiensi maka akan semakin tidak efisien pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Analisis tingkat efektivitas Delapan Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten menggunakan analisis rasio selama periode 2015- 2018

Hasil analisis tingkat efektivitas kinerja keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten menggunakan analisis rasio selama periode 2015-2018, Efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten secara rata-rata terdapat tujuh pemerintah daerah yang dapat dikategorikan sangat efektif.

Kota Tangerang Selatan sebesar 109,61%, Kota Tangerang sebesar 113,37%, Kabupaten Tangerang sebesar 119,18%, Kabupaten Serang sebesar 104,42%, Kota

Serang sebesar 111,37%, Kabupaten Pandeglang sebesar 103,99%, serta Kabupaten Lebak sebesar 106,31%. Hanya terdapat satu pemerintah daerah yang dikategorikan efektif yaitu Kota Cilegon sebesar 94,31%. Hal tersebut menggambarkan bahwa pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten sudah mampu merealisasikan PAD melebihi target yang direncanakan. Semakin tinggi rasio efektivitas maka kinerja keuangan pemerintah semakin baik.

Analisis Menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA)

Hasil analisis tingkat efisiensi Delapan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA) dengan asumsi Variable Return To Scale (VRS) berorientasi output secara teknis selama periode 2015-2018 menunjukkan bahwa: tidak ada satu pun pemerintah daerah yang mencapai nilai efisiensi sempurna. Hanya saja ada yang paling mendekati nilai efisiensi sempurna, yaitu Kota Serang dengan score 99,66%. Hal ini dapat diartikan pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten belum mampu mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimilikinya dan dikategorikan daerah yang efisien.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten, maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan analisis tingkat efektivitas kinerja keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten menggunakan analisis rasio selama periode 2015-2018, Efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten secara rata-rata terdapat tujuh pemerintah daerah yang dapat dikategorikan sangat efektif yaitu Kota Tangerang Selatan sebesar 109,61%, Kota Tangerang sebesar 113,37%, Kabupaten Tangerang sebesar 119,18%, Kabupaten Serang sebesar 104,42%, Kota Serang sebesar 111,37%, Kabupaten Pandeglang sebesar 103,99%, serta Kabupaten Lebak sebesar 106,31%. Hanya terdapat satu pemerintah daerah yang dikategorikan efektif yaitu Kota Cilegon sebesar 94,31%. Hal tersebut menggambarkan bahwa pemerintah daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten sudah mampu merealisasikan PAD melebihi target yang direncanakan. Semakin tinggi rasio efektivitas maka kinerja keuangan pemerintah semakin baik.
2. Berdasarkan analisis tingkat efisiensi kinerja keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten menggunakan analisis rasio selama periode 2015-2018, Efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten secara rata-rata terdapat dua pemerintah daerah yang dapat dikategorikan cukup efisien yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang sebesar 86,57% dan 87,16%. Terdapat dua pemerintah daerah yang dikategorikan kurang efisien yaitu Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang sebesar 91,81% dan 97,70%. Sedangkan terdapat empat pemerintah daerah lainnya yang dikategorikan tidak efisien yaitu Kota Tangerang Selatan sebesar 102,46%, Kota Tangerang sebesar 101,96, Kota Serang sebesar 100,67% dan Kota Cilegon sebesar 100,94%.
3. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten periode 2015-2018 menggunakan metode Data Analysis Envelopment (DEA) dengan pendekatan intermediasi, berasumsi VRS dan berorientasi output secara individu menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat satu pun pemerintah daerah yang mampu menghasilkan serta mempertahankan score efisiensi secara maksimum mencapai 100%.

Referensi

- Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Mahsun, M. (2012). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.
- Saputra, D. (2014). Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah pada Kabupaten Dan Kota di Propinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Ulum, I. (2012). *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar*. PT Bumi Aksara.
- Yani, A. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.